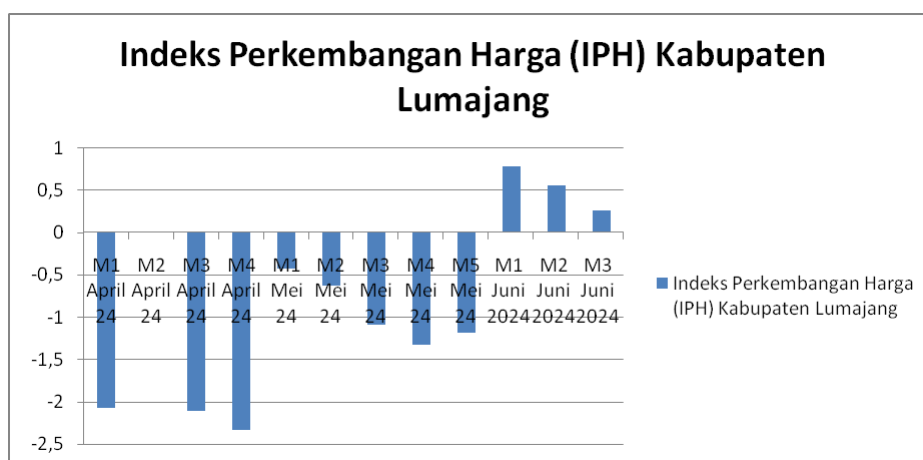


1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Pada Triwulan II Tahun 2024 terdapat 2 (dua) Hari Besar Keagamaan yaitu Perayaan Hari Raya Idul Fitri pada tanggal 11 April 2024 dan Hari Raya Idul Adha, dimana pada momen perayaan Hari Besar keagamaan seringkali terjadi kenaikan harga Kebutuhan bahan pokok dan penting lainnya.

menurut angka IPH Triwulan II Tahun 2024 Kabupaten Lumajang tidak mengalami kenaikan harga bahan kebutuhan pokok yang signifikan, malah pada bulan April terjadi deflasi pada Minggu ke 1, 3 dan 4 April hal ini terjadi sampai dengan bulan Mei 2024.

Grafik Perkembangan IPH di Kabupaten Lumajang selama Triwulan II Tahun 2024 adalah sebagaimana tabel berikut.



2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Dari data IPH dari BPS Kabupaten Lumajang, komoditas bawang merah dan cabe rawit menjadi penyumbang kenaikan Indeks Perkembangan Harga. Jika dikomparasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, permasalahan yang menjadi penyebab kenaikan harga komoditas tersebut adalah rendah nyaproduktifitas yang dialami oleh daerah penghasil, sedangkan permintaan tetap, sehingga mengakibatkan tingginya harga jual di pasaran.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah Kabupaten Lumajang dalam rangka pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat telah melakukan beberapa langkah kongkret yaitu :

1. Gerakan Pangan Murah (GPM)

Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kabupaten Lumajang dilaksanakan pada Triwulan II Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 01 April dan 12 Juni 2024.

Pada pelaksanaan GPM terdapat beberapa komoditas yang dijual antara lain :

Komoditas yang dijual di Gerakan Pangan Murah yaitu :

- Beras SPHP = 8 Ton
- Beras Nagayana = 3 Ton
- Gula Pasir = 1 Ton
- Telur Ayam Ras = 1 Ton
- Bawang Merah = 5 Kwintal
- Bawang Putih = 1,5 Kwintal
- Cabe Merah Besar = 70 kg
- Cabe Rawit Merah = 2 Kwintal dan Aneka Produk Olahan UMKM

2. Menjaga Pasokan Bahan Kebutuhan Pokok dan barang penting lainnya

Dalam rangka menjaga pasokan bahan kebutuhan pokok dan barang penting lainnya TPID Kabupaten Lumajang telah melaksanakan sidak kepada stasiun pengisian dan pengangkutan Bulk Elpigji (SPPBE) pada tanggal 06 Juni 2024, mengundang Produsen beras yang ada di Lumajang pada tanggal 14 Juni 2024 dengan agenda Pj. Bupati meminta Produsen beras untuk memproduksi Beras Medium dan mengeluarkan Surat Edaran Gerakan Menanam Cepat Panen serta Pemanfaatan Lahan Pekarangan pada tanggal 05 April 2024.

2. Rapat Teknis TPID

Untuk mengantisipasi kenaikan harga menjelang perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN), Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui TPID mengadakan Rapat Koordinasi Teknis yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2024 di Ruang Rapat Terbatas Sekda Kabupaten Lumajang. Dimana pada Rapat Koordinasi Teknis dihadiri oleh OPD Teknis (DKPP, Diskopindag, Bappeda, BPS dan HIswana Migas) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah untuk merumuskan rekomendasi kebijakan untuk menjaga stabilitas harga, keamanan stock pangan, kelancaran distribusi dalam menghadapi Perayaan Hari Raya Idul Adha.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah dilaksanakan, pada saat sebelum dan sesudah Perayaan Idul Fitri dan Idul Adha 2024 Indeks Perkembangan harga dan harga bahan kebutuhan pokok di Kabupaten Lumajang tidak mengalami kenaikan yang signifikan (terkendali).

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Teknis Tim Pengendali Inflasi Daerah Kabupaten Lumajang yang dilaksanakan pada 29 Mei 2024, Rekomendasi Kebijakan Kepala Daerah antara lain :

1. Revitalisasi TPID, terutama dengan melibatkan BPKD untuk kemungkinan penggunaan

BTT sebagai upaya penanganan inflasi;

2. Rapat teknis TPID secara rutin (bisa setelah pelaksanaan rapat zoom tiap senin) untuk mengetahui perkembangan Produktifitas Tanaman Pangan dan potensi Panen di Kabupaten Lumajang serta kecukupan stok dan harga, sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan;
3. Menindaklanjuti pemberitaan dugaan kecurangan pengisian LPG 3 Kg bersubsidi, perlu segera dilakukan sidak kepada agen pengisian LPG 3 Kg di Kabupaten Lumajang.